

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan bagian dari reformasi pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan daerah, seperti yang mengatur tentang pengelolaan laporan keuangan, menggantikan beberapa kebijakan pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Fenomena laporan keuangan pemerintah yang tidak menyajikan informasi yang sesuai peraturan dan masih sering terjadi di kalangan organisasi sektor publik, dan masih banyak ditemukannya penyimpangan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah.

Hal ini meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap tata pemerintahan yang baik (*good governance government*) semakin meningkat. Ada tiga mekanisme yang dapat diterapkan daerah untuk menjadi lebih responsif, lebih transparan, lebih akuntabel, yang selanjutnya akan mewujudkan *good governance*. 1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kolaboratif pemberdayaan masyarakat; 2. Menyempurnakan aturan dan tata kelola internal; dan 3. menciptakan lingkungan yang kompetitif dalam memberikan layanan masyarakat dan layanan pemasaran. Ketiga mekanisme ini saling terkait dan saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. (Mahayuni, 2017)

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, prakarsa khusus. Sama halnya dengan tingkat daerah, laporan pertanggungjawaban harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan pengguna dalam pengambilan keputusan.

Informasi akan bermanfaat apabila informasi itu dapat mendukung untuk pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Jika informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh orang-orang, itu sangat membantu. Oleh karena itu, untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan, pemerintah daerah harus memperhatikan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dari pemerintah daerah harus memuat informasi akuntansi yang memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan informasi akuntansi harus dipenuhi dengan memasukkan aspek kualitatif laporan keuangan sebagai standar pengukuran. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) mencantumkan kualitas-kualitas berikut sebagai kondisi normatif untuk laporan keuangan pemerintah: 1. relevan; 2. dapat diandalkan; 3. sebanding; dan 4. Dimengerti (Armando, 2013).

Laporan keuangan yang dihasilkan tunduk pada prinsip penyusunan dan ketepatan waktu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 71 2010. Setelah ditelaah oleh “Badan Pemeriksa Keuangan”, laporan keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum (BPK). Laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan komponen pelaporan keuangan yang akan disampaikan (Komite SAP,2012).

Pentingnya data dalam laporan keuangan harus diperhitungkan oleh pemerintah daerah ketika membuat keputusan perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus memenuhi persyaratan minimum tertentu.

Sistem informasi akuntansi yang tidak mapan dan pemantauan yang tidak memadai mungkin menjadi penyebab buruknya kualitas data pelaporan keuangan. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperluas penggunaan sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan manajemen keuangan di sektor ini. Untuk menciptakan sistem jaringan, pemerintah harus memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Dengan menyediakan akses antar unit kerja untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, informasi manajemen dan prosedur kerja memungkinkan pemerintah beroperasi secara terintegrasi. Transaksi yang kompleks dan banyak harus dilakukan di unit akuntansi pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan pemerintah dan pengolahan data transaksi keduanya akan dipercepat dengan penggunaan teknologi informasi, sehingga mencegah laporan keuangan dari (Pujiswara, 2014)

Optimalisasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan pengungkapan kinerja keuangan pemerintah.

Persyaratan sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan untuk melaksanakan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, hal ini sejalan dengan aksesibilitas laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan dan temuan akuntabilitas yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas Pelaporan Keuangan Daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. (Zeny. 2020)

Kebutuhan informasi laporan keuangan saat ini khususnya di kalangan masyarakat semakin besar. Informasi yang disajikan sektor publik harus mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tetapi harus patuh dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan daerah harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK yang dilakukan sepanjang tahun 2015, terdapat 16.702 temuan dengan total 24.167 kekhawatiran senilai Rp44,95 triliun. Dari isu-isu tersebut, 29,57 persen memiliki dampak ekonomi sebesar Rp31,49 triliun. Selain itu, hanya 16 dari total 33 provinsi atau 48,48% yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan dari 491 kabupaten/kota, hanya 156 atau 31,77% yang melakukan hal yang sama. Angka-angka ini menunjukkan bahwa laporan

keuangan masih memiliki banyak masalah, dan hanya sebagian kecil dari pemerintah daerah dengan opini WTP mengatakan bahwa mereka telah memperbaikinya (Herlina, 2021)

Hal pertama yang dapat mempengaruhi nilai informasi keuangan adalah penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan, mencatat dan mengolah kegiatan keuangan pemerintah daerah dalam suatu laporan keuangan yaitu informasi yang pihak-pihak di daerah dapat menggunakan petugas informasi akuntansi keuangan

Hal kedua yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah pengawasan keuangan daerah, suatu proses yang berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berfungsi secara efektif sesuai dengan rencana dan peraturan, ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 51). 2010). Tujuan monitoring pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika ternyata terdapat penyimpangan atau hambatan, diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dilakukan tindakan perbaikan. Melalui tindakan korektif ini diharapkan kinerja kegiatan terkait tetap dapat mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses dijalankan dengan benar dan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan. (Mardiasmo,2006). Menyajikan informasi keuangan yang andal kepada pengguna sesuai dengan rencana yang ditetapkan memerlukan media

khusus yang dianggap relevan yaitu pengawasan keuangan daerah . (Tuasikal, 2007).

Jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut: 1. pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dilakukan dengan pengawasan langsung; 2. Unit pengawasan tersendiri di luar unit organisasi yang disupervisi melakukan pengawasan inspeksi di bawah supervisi eksternal. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, sebuah lembaga tinggi negara yang bebas dari kekuasaan apapun. 3. pengawasan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk mengungkap potensi penyimpangan lebih cepat, pengawasan preventif akan lebih efektif dan relevan jika dilakukan bersama atasan langsung. Pengawasan represif adalah pengawasan terhadap suatu kegiatan setelah selesai. Pada akhir tahun anggaran, ketika anggaran yang ditentukan kemudian diberikan kepada laporan, pengawasan biasanya dilakukan. Selain itu, pemantauan dan inspeksi dilakukan untuk memeriksa potensi anomali. (Halim, 2004).

Pemerintah sebagai entitas pelapor (*reporting entity*) harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena:1. pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; 2. Penggunaan sumber daya tersebut oleh pemerintah dapat berdampak besar pada kebahagiaan dan perekonomian masyarakat 3. Ada pemisahan antara pengelolaan dan

kepemilikan sumber daya tersebut (Partono, 2000). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan bahwa beberapa kelompok pengguna utama laporan keuangan pemerintah tidak terbatas pada: 1. masyarakat, 2. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, 3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta 4.pemerintah. (Pramudiarta, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pegawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada kantor pemerintah Kota Palopo.
- b. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada kantor pemerintah Kota Palopo.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah Kota Palopo.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh pengawasan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah Kota Palopo.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah pada penelitian dapat bermanfaat bagi teoritis, praktis maupun dari segi kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai permasalahan pemanfaatan sistem informasi akuntansi daerah dan pengawasan keuangan daerah pada pemerintah kota palopo
- b. Bagi masyarakat, dapat mengetahui serta memahami kondisi nyata dari adanya proses pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan , dan
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan untuk mengembangkan dan menerapkan keilmuan dalam bidang ilmu akuntansi yang telah di dapatkan, serta dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak lain khususnya dalam masalah keuangan Daerah.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sarana evaluasi, dan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kantor BPKAD kota Palopo. Penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, meliputi perbandingan mengevaluasi dan menciptakan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan mengkaji kualitas nilai sistem informasi meliputi ketepatan waktu, akurasi, relevansi, dan kepercayaan.

Untuk lebih dekat dengan tema-tema signifikan yang akan dibahas, maka masalah penelitian menjadi krusial. Apapun yang disepakati sebagai termasuk dalam lingkup masalah penelitian adalah batasan dari masalah ini. Pertimbangan yang tepat, termasuk pertimbangan teoretis dan praktis, harus digunakan untuk memutuskan di mana batas masalah akan tetap ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Subhan, 2011). Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal berkewajiban untuk memberi penghargaan kepada agen atas jasa yang diberikan oleh prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal merupakan sumber konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang maksimal. Prinsipal dan agen juga berusaha menghindari risiko (Belkaouli, 2001 dalam Subhan, 2011).

Teori keagenan dalam pemerintahan daerah mulai diterapkan, terutama sejak pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan dapat dipelajari dari dua sudut pandang, yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif kepada rakyat, dampaknya bisa positif dalam bentuk efek, akan tetapi

sebagian besar berupa dalam bentuk negatif dalam bentuk peluang perilaku opportunistic (Subhan, 2011). Hal ini terjadi karena agen memiliki bentuk keuntungan berupa informasi keuangan atas prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal dapat juga memanfaatkan keuntungannya sendiri karena telah memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika para pemimpin cenderung memaksimalkan kepentingannya sendiri, dimulai dengan proses penganggaran, pengambilan keputusan sampai dengan penyajian laporan keuangan yang sewajarnya untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik, serta untuk mengamankan diri mereka di mata legislatif dan rakyat.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Agar pemerintah daerah dapat beroperasi secara efektif, efisien, jelas, dan terbuka untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, sistem informasi akuntansi harus didukung. Penggunaan program teknologi informasi yang mendukung Sistem Informasi Keuangan Daerah memungkinkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010, SIKD adalah suatu sistem pencatatan, pengelolaan, dan pengolahan data dari pengelolaan keuangan daerah dan sumber lain yang terkait menjadi informasi yang disajikan, dipublikasikan, dan pengambilan keputusan penting dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan membuat keputusan pemerintah daerah. akuntabilitas. Sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berhubungan dengan keuangan daerah yang diperlukan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Suatu metode penggabungan, penggolongan, pencatatan, dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam menentukan pilihan dapat disebut sebagai sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Penerapan sistem informasi akuntansi oleh setiap SKPD dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan rangkaian yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan itu, kemudian beralih ke pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem informasi keuangan daerah dapat menyediakan titik akses baru untuk data keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan aplikasi yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan, serta digunakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Diatur oleh pemerintah. Perangkat sebagai pengguna anggaran memerlukan entitas pelaporan keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan.

Selain penyusunan laporan keuangan tahunan secara berkala, pelaksanaannya juga memerlukan fungsi pendukung berupa sistem yang didukung teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, mikro*), perangkat lunak, database, jaringan (*internet, intranet*),

perdagangan elektronik, dan jenis teknologi lainnya yang berhubungan dengan komputer. (Rianisanti 2017:40).

Berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 65 Tahun 2010, pemerintah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah untuk tujuan sebagai berikut:

1. Membantu pimpinan daerah dalam mengembangkan kebijakan keuangan yang sehat.
2. Membantu pimpinan daerah dan organisasi terkait lainnya menilai kinerja keuangan daerahnya.
3. Berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan statistik keuangan daerah
4. Menyajikan fakta keuangan daerah secara bebas kepada publik

Pemerintah wajib menyusun bahan untuk melacak pelaksanaan proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyempurnakannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. untuk mempermudah penyebaran informasi keuangan masyarakat tentang daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah untuk menyeimbangkan kepentingan umum yang merupakan tugas pokok pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memudahkan akses antar unit kerja dan memungkinkan pemerintah beroperasi secara terintegrasi. Masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan publik yang terjangkau. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

2.2.1 Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator dari sistem jaminan informasi keuangan negara adalah sebagai berikut (SIA 2008):

1. Waktu jam
2. Istilah untuk kepemimpinan
3. Ambang batas efisiensi biaya
4. Indikator kualitas yang dihasilkan

2.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002).

2.3.1 Pengertian Pengawasan

pengawasan sesuai dengan standar dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005. Menurut Pasal 1 (satu), pengawasan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mengikuti kebijakan dan pedoman hukum dan peraturan yang relevan. (Husna 2013:7).

Untuk memastikan bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah, pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar

kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan (Rifandi 2018:52).

Proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. Menurut Pasal 1 Ayat 6, pengawasan adalah proses tindakan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi sesuai dengan kebijakan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahwa mereka selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi berharga.

2.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut (Halim, 2004):

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dilakukan dengan pengawasan langsung.
- b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berbeda diluar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah badan pemeriksa keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- c. pengawasan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan dengan atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

- d. Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan dilakukan biasanya pada akhir tahun anggaran dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.3.3 Indikator Pengawasan

Indikator dari pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut (Handoko2015:371-372):

- a) Akurat (*Accurate*)

Data kinerja yang akurat harus disediakan. Sebuah perusahaan dapat mengambil tindakan yang gagal untuk memecahkan masalah atau hanya membuat yang baru karena data yang tidak akurat dari sistem kontrol.

- b) Tepat waktu (*Timely*)

Jika tindakan cepat akan dilakukan untuk melakukan perbaikan, informasi perlu segera dikumpulkan, disalurkan, dan dianalisis.

- c) Objektif dan Menyeluruh

Informasi harus jelas, akurat, dan komprehensif.

- d) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi

Sistem kontrol harus fokus pada area di mana penyimpangan dari standar dan standar paling umum atau akan menyebabkan kerusakan paling serius.

e) Realistik secara ekonomis

Sebuah sistem pemantauan seharusnya hanya menghabiskan biaya sebanyak yang diizinkan untuk melakukannya, jika tidak kurang.

f) Realistic secara organisasional

Sistem pemantauan harus sejalan dengan atau melengkapi realitas organisasi.

g) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Pemantauan informasi perlu diintegrasikan dengan alur kerja organisasi.

h) Fleksibel (*flexible*)

Sistem pengendalian yang efisien harus mampu memantau perubahan sehingga organisasi dapat mengambil tindakan segera untuk menangkal perubahan negatif atau mendapatkan keuntungan dari perubahan.

i) Preskriptif dan operasional

Ketika standar dilanggar, kontrol yang efektif dapat menentukan tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan. Ketika informasi mencapai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan perbaikan, itu harus dalam bentuk yang dapat digunakan.

j) Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus dapat mempengaruhi bagaimana pekerjaan anggota organisasi dilakukan dengan menumbuhkan perasaan kemandirian, akuntabilitas, dan prestasi.

2.4 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sangat diandalkan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakainya. Agar suatu laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam keputusan. Definisi nilai informasi menurut Davis (2002) adalah nilai perubahan dalam perilaku keputusan yang disebabkan oleh informasi dikurangi biaya informasi sedangkan menurut Merriam Webster, nilai informasi bias diartikan sebagai data dengan artian atau makna atau informasi yang memiliki arti penting dan manfaat yang relative untuk membuat suatu keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi dengan cara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat jika informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai mempercayai informasi tersebut. Sehingga nilai informasi merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Komite SAP,2012).

Informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif Laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010):

a. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut:
1. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya di sajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 2. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 3. Netralitas, yaitu informasi diharapkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan informasi yang termua dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keungan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang di sesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Komite SAP, 2012)

2.5 Penelitian Terdahulu

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

	Nama/Tahun/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel Penelitian
1	Jezhica S.M. Lengkey(2019). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Manado)	Hasil penelitian melalui uji F menyatakan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah kota Manado. Agar dapat diberikan nilai informasi laporan keuangan daerah terjaga dengan baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan	X pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan. Y nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah
2	Rizal pramudiarta (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi	X Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern. Y Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah
3	Fani ikramullah lubis (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan)	Berdasarkan hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem informasi keuangan daerah (X_1) terhadap akuntabilitas pemerintah daerah (Y) dan terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengawasan keuangan daerah (X_2) terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah (Y). Berdasarkan hasil analisis simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1), dan variabel	X Sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah, Y Akuntabilitas pemerintah daerah.

		pengawasan keuangan daerah (X_2) terhadap akuntabilitas pemerintah daerah	
4	Mila Aguspita(2019). pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah kota medan.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_1). Kedua, variabel pengawasan keuangan daerah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_2). Ketiga, variabel keuangan daerah (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengawasan daerah (Y_1). Keempat, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2). Kelima, variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah (X_1) dan pengawasan keuangan daerah (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2).	X pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah, Y Transparansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Siska yulia defitri (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.	X Pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, Y Kualitas laporan pemerintah daerah
6	Venny Eka Saputri (2018). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi	Hasil penelitian ini secara parsial dan secara simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi	X Pemanfaatan sistem informasi akuntansi

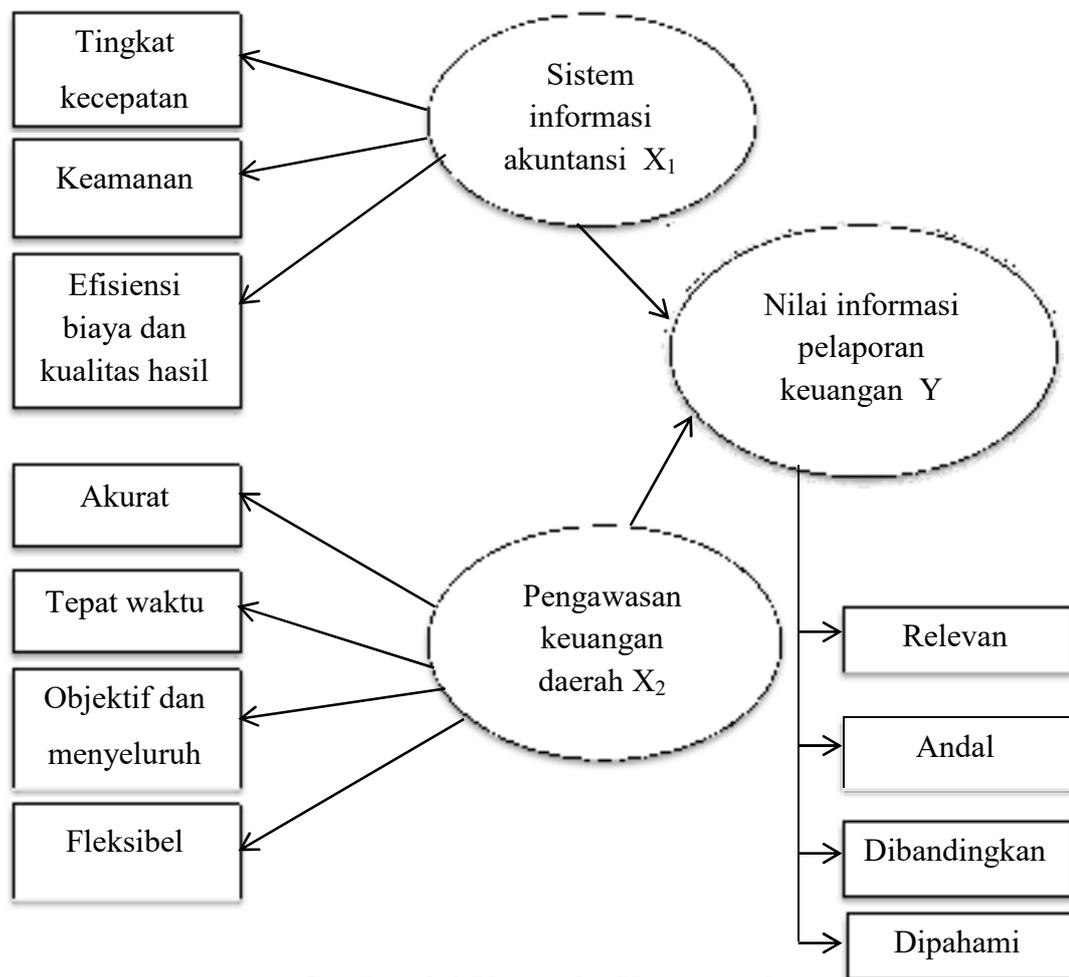
	keuangan dan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir)	keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan kabupaten Indragiri hilir.	keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah, Y Nilai informasi pelaporan keuangan.
7	Ariefsetya Darmawan(2018). Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dalam penentuan kebijakan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	X sumber daya manusia, Y Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Dwi Anita Indrawati (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten sampang)	Hasil penelitian pengujian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan pemerintah daerah.pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.	X bahwa kualitas sumber daya manusia. Y nilai informasi pelaporan pemerintah daerah
9	Annisa Islamiyah Nur (2017) Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa	Hasil menggunakan uji T menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah (X_1), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_2), berpengaruh nyata terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi(X_2) karena mempunyai koefisien tertinggi: 5,379	X Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, Y Nilai informasi laporan keuangan

10	<p>Tri Listiani (2018). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi ,sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman Empiris Pada Organisasi Perangkat akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Daerah Di Kota Magelang)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi kompetensi sumber daya manusia pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota magelang. Sementara untuk variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota magelang.</p>	<p>X Sistem informasi akuntansi,sistem pengendalian internal,kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi. Y kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
----	--	--	--

Tabel. 2.1. Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi 3 variabel yaitu sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan daerah, nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Palopo. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dan tinjauan penelitian dari uraian di atas maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₁:Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

H₂:Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, Menurut (Resseffendi 2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti.

Sugiyono (2017:2) mengatakan bahwa, desain penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, seperti yang dikemukakan (Sugiyono 2017:8) bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengaju hipotensis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur bagaimana pengaruh sistem informasi keuangan dan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Kota Palopo yang berlokasi di Jl. Jendral sudirman, Tompotika, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua bulan dari bulan juli sampai september 2022.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115) Populasi merupakan bidang umum yang berdasarkan subjek atau subjek yang menggunakan ciri yang diidentifikasi oleh peneliti, untuk dipelajari, diselidiki, kemudian disimpulkan. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan BPKAD kota palopo.

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi." Metode pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 45 karyawan dengan Metode purposive sampling, Menurut Sugiyono (2015:85) *Purposive sampling* yaitu suatu metodologi pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan, adalah teknik yang digunakan. Kriteria berikut digunakan untuk memilih sampel penelitian yang terlibat dalam penelitian ini adalah pegawai bidang akuntansi dan penatausahaan aset daerah di BPKAD kota palopo dan karyawan yang telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun lamanya.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis dan sumber data adalah:

3.4.1 Jenis Data

Data kuantitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari BPKAD dalam bentuk angka-angka yang perlu dianalisis kembali, seperti jumlah seluruh karyawan dan data lain yang mendukung penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer menurut Sugiyono (2016:402) sumber data primer memberikan kumpulan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang diukur menggunakan skala likert.
2. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2016:402) sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengeumpul data misalnya melalu orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data sekeunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen-dokumen pendukung seperti gambaran struktur organisasi pada kantor BPKAD Kota Palopo

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa, keterangan-keterangan, dan karakteristik-karakteristik, sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan

menunjang atau mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi.

1. Kuesioner (angket) merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis. Kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Kuesioner ini diberikan secara langsung kepada responden dari masing-masing organisasi perangkat daerah di Kota Palopo . Dalam penelitian ini kuesioner yang disusun berdasarkan pada indikator-indikator dari variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan transparansi. Selengkapanya pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada lampiran nomor satu. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert.
2. Observasi atau Menggunakan panca indera mata sebagai alat utama dan panca indera lainnya—telinga, indra penciuman, indra perasa, dan indra peraba—pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari bagi manusia.. Observasi disini merupakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang di observasikan dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media-media transparan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada pegawai pada kantor BPKAD.

3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38) Variabel penelitian adalah karakteristik atau nilai dari suatu subjek, hal, atau kegiatan yang peneliti pilih untuk dipelajari dan selanjutnya diambil kesimpulannya. Dilihat dari jenis penelitian yang

dilakukan, variabel penelitian dalam penelitian ini berupa gagasan yang konkrit atau konsep operasional. Variabel digambarkan sebagai fenomena yang berubah, tetapi sebelum dapat diukur, pengertian operasional variabel harus digunakan untuk memahami variabel. Tidak mungkin suatu variabel hanya berhubungan dengan satu variabel lain; sebaliknya, selalu berdampak pada variabel lain.

1. Urutan waktu terjadinya biasanya merupakan variabel pertama yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pengawasan keuangan daerah merupakan variabel bebas dalam penelitian ini.
2. Faktor terikat (dependen) Variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel bebas dikenal sebagai variabel terikat.

3.6.2 Defenisi Operasional Variabel

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_1) melibatkan penerapan sistem yang mengelompokkan, mengklasifikasi, mencatat, dan mengolah kegiatan keuangan pemerintah daerah menjadi laporan keuangan sebagai informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan di BPKAD dalam prosesnya. dari mempersiapkan laporan. pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan daerah (X_2) adalah proses kegiatan yang ditunjukkan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan terkait dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai informasi tinggi.

Nilai informasi pelaporan keuangan (Y), merupakan laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen dirancang pertama kali dengan merancang instrument yang akan diteliti. Kemudian penulis menyusun instrumen itu diuji cobakan, di analisis, sehingga diperoleh instrumen yang akurat (*valid*) dan andal (*reliabel*). Instrument yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topic tertentu diberikan kepada individu dengan maksud memperoleh data (Yusuf., 2014:199), kuesioner diukur menggunakan skala likert. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Penyusunan kuesioner dengan menggunakan skala *likert* dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1 Penilaian Skor Pernyataan

Jenis Pernyataan	Jenis Jawaban	Skor
Positif	Sangat Tidak Setuju	1
	Tidak Setuju	2
	Netral	3
	Setuju	4
	Sangat Setuju	5

3.8 Analisis Data

Setelah responden mengisi kuesioner dan mengembalikannya, langkah selanjutnya adalah memilih teknik analisis terbaik untuk digunakan. Bobot jawaban atas pertanyaan untuk setiap variabel kemudian diberikan dan ditambahkan. Pendekatan analitik peneliti meliputi analisis linier berganda, pengujian hipotesis, penilaian kualitas data, dan analisis statistik deskriptif.

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Chandrarin, 2017) Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi dan mengkarakterisasi sifat-sifat sampel yang diamati. Hasil dari uji statistik deskriptif biasanya berbentuk tabel dengan variabel yang diamati, mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum, serta penjelasan dalam bentuk narasi yang menjelaskan bagaimana isi tabel harus ditafsirkan.

3.8.2 Uji Kualitas Data

Karena data merupakan deskripsi dari variabel yang diteliti dan akan digunakan untuk mendukung hipotesis, pengujian kualitas data memerlukan penyebaran kuesioner. Peneliti akan melakukan tes berikut untuk menentukan apakah tanggapan responden sah dan apakah instrumen tersebut layak digunakan:

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016) Validitas kuesioner dievaluasi dengan menggunakan uji validitas. Jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan informasi yang akan digunakan untuk menilai sesuatu, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari r tabel,

item pernyataan dianggap tidak valid, namun jika nilai korelasi Pearson lebih dari r tabel, item pernyataan dianggap valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas kuesioner dapat diukur dengan menggunakannya sebagai indikator suatu variabel atau konstruk (Ghozali, 2016). Mengetahui bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya sehingga diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik disebut reliabilitas. Jika responden secara konsisten memberikan tanggapan yang konsisten atau stabil terhadap pertanyaan, kuesioner dianggap kredibel. Dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, validitas data yang digunakan dalam penelitian ini akan dievaluasi. Jika nilai *Cronbach's Alpha* suatu variabel lebih besar dari 0,60, maka variabel tersebut dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2016).

3.8.3 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Variabel (Uji Statistik t)

Menurut (Chandrarin, 2017) Uji t merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Uji ini merupakan uji lanjutan ketika ada kepastian dari uji F yang hasilnya signifikan. Kriteria sigifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikansi pada teknik analisis regresi linear sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. jika hasil analisis menunjukan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen secara statistik signifikan pada level alfa sebesar 5%.

Sebaliknya jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,005$, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik tidak signifikan.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Chandrarini, 2017) Pengukuran yang digunakan dalam uji koefisien determinasi mengungkapkan persentase varians dalam variabel independen yang dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki kelemahan karena bias terhadap jumlah variabel independen dan pengamatan yang ada dalam model regresi, meningkatkan nilai R^2 bahkan ketika variabel yang dimasukkan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi yang disesuaikan, sering dikenal sebagai kotak R yang disesuaikan, digunakan untuk mengurangi kekurangan ini (R^2_{adj}). Koefisien determinasi yang disesuaikan menandakan bahwa koefisien telah diperbaiki dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan uji F adalah untuk mengetahui apakah rumusan model persamaan regresi linier sederhana terhadap pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akurat. Kriteria pengujian menampilkan besaran nilai F dan tingkat signifikansi p. Model yang dirumuskan dalam persamaan regresi linier berganda dapat dikatakan akurat jika hasil analisis menunjukkan nilai P sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa 33 model persamaan regresi signifikan pada taraf alpha 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$, model persamaan regresi tidak

signifikan pada tingkat alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat oleh persamaan regresi linier berganda tidak akurat.

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda adalah model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel terikat (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas dalam penelitian regresi berganda, sehingga terjadi hubungan fungsional antar variabel terikat. Berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas dan model yang ditunjukkan di atas, yang menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas, maka model persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Nilai informasi pelaporan keuangan

A = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem informasi akuntansi keuangan daerah

X_2 = Pengawasan keuangan daerah

e = Error (tingkat kesalahan)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKAD) Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo. Emrio badan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palopo yang kemudian digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya ditindak lanjuti tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota

Palopo dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

4.1.1 Visi dan Misi BPKAD kota Palopo

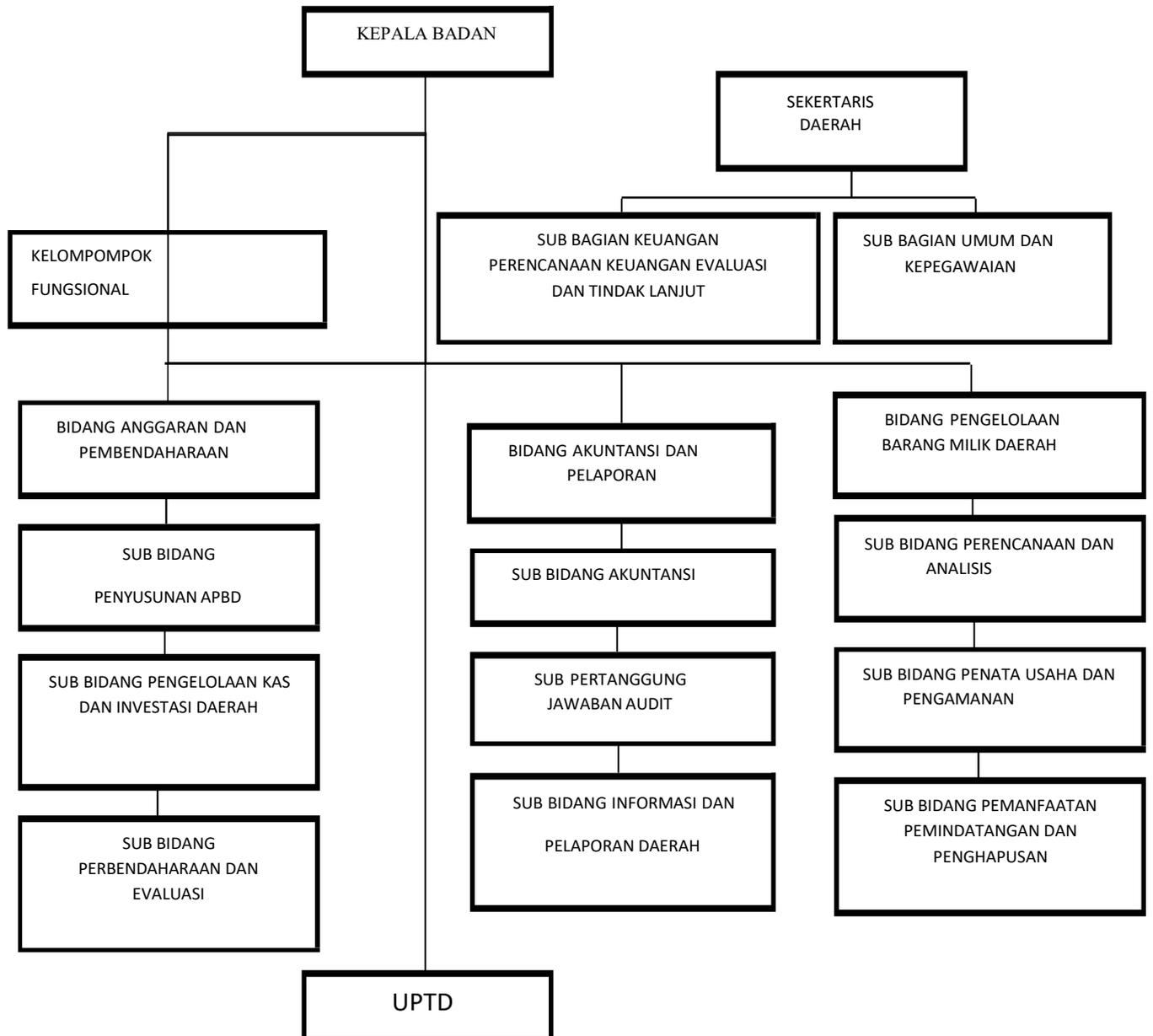
1. Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Visi organisasi **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkualitas”**, ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Palopo.

2. Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Untuk menetapkan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Bertujuan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM;
2. meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan aset lokal dan jasa pengelolaan keuangan.

4.1.2 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.2. Gambaran Umum Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang di terapkan oleh kantor BPKAD Kota Palopo pada dasarnya mencakup sebuah kumpulan elemen yang saling berkaitan yang berfungsi menerima input (masukan), mengolah input, dan menghasilkan output (keluaran) yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisir dan diproses sehingga bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Dimana pemerintah Kota Palopo memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007. Atas dasar tersebut pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi human error, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi sektor publik utamanya pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks

dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi yang dilakukan oleh kantor BPKAD Kota Palopo pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. Teknologi informasi sangat berperan terhadap perkembangan akuntansi utamanya membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang lebih mudah, efektif, efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo.

4.3 Gambaran Umum Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh BPKAD Kota Palopo yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Kinerja Kantor BPKAD Kota Palopo dalam pengawasan keuangan daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai oleh

anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki anggota dewan tersebut. Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan dalam pemerintahan sangat diperlukan, karena melalui berjalanya fungsi pengawasan yang baik, akan memberikan jaminan tercapainya tujuan dari rencana yang telah ditetapkan serta memberi peringatan dini jika terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Palopo yakni mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban yang cukup efektif. Dengan berjalannya pengawasan keuangan yang baik dalam hal APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.4. Karakteristik Responden

Deskripsi responden yang menjadi penelitian diklasifikasikan Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu individu-individu yang terlibat berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada karyawan kantor BPKAD kota palopo. Berikut ini adalah gambaran umum deskripsi responden.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut pada tabel 4.1 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pada jenis kelamin :

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki-laki	18	40 %
2.	Perempuan	27	60 %
	Jumlah	45	100 %

Sumber: Data primer diolah 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 18 orang atau 40% dan jumlah responden perempuan sebanyak 27 orang atau 60%.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia:

Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1.	< 30 tahun	16	35,5%
2.	30 – 40 tahun	21	46,8%
3.	> 40 tahun	8	17,7 %
	Jumlah	45	100 %

Sumber: Data primer diolah 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden karyawan kantor BPKAD kota palopo mayoritas berusia 30-40 tahun sebanyak 21 orang atau 46,8%. Selanjutnya yang berusia < 30 tahun sebanyak 16 orang atau 35,5%, berusia > 40 tahun sebanyak 8 orang atau 17,7%.

c. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir :

Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SMA/SMK	13	28,8 %
2	D3	9	20 %
3	S1	20	44,4 %
4	S2	3	6,6 %
	Total	45	100 %

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 13 orang atau sekitar 28,8 %, responden berpendidikan terakhir D3 sebanyak 9 orang atau sekitar 20 %, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 20 atau sekitar 44,4 % dan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang atau sekitar 6,6 %.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Jumlah waktu yang dicurahkan oleh seorang karyawan untuk melakukan tugas dan kewajibannya di dalam unit bisnis dikenal sebagai lama kerja. Seorang karyawan menjadi dapat dipercaya dalam menangani pekerjaan termasuk mengelola informasi yang ada karena volume tenaga kerja. Tabel berikut menampilkan distribusi responden berdasarkan lama kerja:

Tabel 4.4 Kriteria Berdasarkan Lama Bekerja

No	Durasi (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	< 2 Tahun	8	17,7 %
2	2-5 Tahun	27	60 %
3	>5 Tahun	10	22,3 %
	Total	45	100

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Persentase terbesar lama bekerja responden pada kantor BPKAD kota palopo adalah 2-5 Tahun sebanyak 27 orang atau sekitar 60 % dan terendah pada <2 Tahun sebanyak 8 orang atau sekitar 17,7 %. Berdasarkan lama bekerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karyawan di satuan kantor BPKAD kota palopo mempunyai pengalaman yang cukup mengetahui dan sangat berperan dalam kemajuan kantor BPKAD kota palopo.

4.5 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Chandrarin, 2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistic deskriptif biasanya berupa yang berisi variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar, maksimum dan minimum, dan kemudian diikuti penjelasan berupa narasi tentang interprestasi isi tabel tersebut.

Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X _{1.1}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	8	17.8	17.8	17.8
	S	21	46.7	46.7	64.4
	SS	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang menjawab "Netral" 8 orang atau 17.8%, yang menjawab "Setuju" 21 orang atau 46.7%, dan menjawab "Sangat Setuju" 16 orang atau 35.6%.

Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X _{1.2}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	4.4	4.4	4.4
	S	20	44.4	44.4	48.9
	SS	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang menjawab "Netral" 2 orang atau 4.4%, yang menjawab " Setuju" 20 orang atau 44.4%, dan menjawab "Sangat Setuju" 23 orang atau 51.1%.

Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X _{1.3}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	2.2	2.2	2.2
	S	18	40.0	40.0	42.2
	SS	26	57.8	57.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang menjawab "Netral" 1 orang atau 2.2%, yang menjawab " Setuju" 18 orang atau 40.0%, dan menjawab "Sangat Setuju" 26 orang atau 57.8%.

Tabel 4.8 Uji Statistik Deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X _{1.4}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	11.1	11.1	11.1
	S	18	40.0	40.0	51.1
	SS	22	48.9	48.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang menjawab "Netral" 5 orang atau 11.1%, yang menjawab "Setuju" 18 orang atau 40.0%, dan menjawab "Sangat Setuju" 22 orang atau 48.9%.

Tabel 4.9 Uji Statistik Deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X _{1.5}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	13.3	13.3	13.3
	S	16	35.6	35.6	48.9
	SS	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang menjawab "Netral" 6 orang atau 13.3, yang menjawab "Setuju" 16 orang atau 35.6% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 23 orang atau 51.1%.

Tabel 4.10 Uji Statistik Deskriptif Pengawasan Keuangan

X_{2.1}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	8.9	8.9	8.9
	S	18	40.0	40.0	48.9
	SS	23	51.1	51.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan yang menjawab “Netral” 4 orang atau 8.9 yang menjawab “Setuju” 18 orang atau 40.0% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 23 orang atau 51.1%.

Tabel 4.11 Uji Statistik Deskriptif Pengawasan Keuangan

X_{2.2}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	13.3	13.3	13.3
	S	23	51.1	51.1	64.4
	SS	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan yang menjawab “Netral” 6 orang atau 13.3, yang menjawab “Setuju” 23 orang atau 51.1% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 16 orang atau 35.6%.

Tabel 4.12 Uji Statistik Deskriptif Pengawasan Keuangan

X_{2.3}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	4.4	4.4	4.4
	S	26	57.8	57.8	62.2
	SS	17	37.8	37.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan yang menjawab “Netral” 2 orang atau 4.4, yang menjawab “Setuju” 26 orang atau 57.8% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 17 orang atau 37.8%.

Tabel 4.13 Uji Statistik Deskriptif Pengawasan Keuangan

X_{2.4}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	4.4	4.4	4.4
	S	31	68.9	68.9	73.3
	SS	12	26.7	26.7	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan yang menjawab “Netral” 2 orang atau 4.4, yang menjawab “Setuju” 31 orang atau 68.9% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 12 orang atau 26.7%.

Tabel 4.14 Uji Statistik Deskriptif Pengawasan Keuangan

X_{2.5}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	11.1	11.1	11.1
	S	23	51.1	51.1	62.2
	SS	17	37.8	37.8	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan yang menjawab “Netral” 5 orang atau 11.1, yang menjawab “Setuju” 23 orang atau 51.1% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 17 orang atau 37.8%.

Tabel 4.15 Uji Statistik Deskriptif Informasi Pelaporan Keuangan

Y.¹					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	4.4	4.4	4.4
	S	27	60.0	60.0	64.4
	SS	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel informasi pelaporan keuangan yang menjawab “Netral” 2 orang atau 4.4, yang menjawab “Setuju” 27 orang atau 60.0% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 16 orang atau 35.6%.

Tabel 4.16 Uji Statistik Deskriptif Informasi Pelaporan Keuangan

Y. ²					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	11.1	11.1	11.1
	S	30	66.7	66.7	77.8
	SS	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel informasi pelaporan keuangan yang menjawab “Netral” 5 orang atau 11.1, yang menjawab “Setuju” 30 orang atau 66.7% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 10 orang atau 22.2%.

Tabel 4.17 Uji Statistik Deskriptif Informasi Pelaporan Keuangan

Y. ³					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	11.1	11.1	11.1
	S	30	66.7	66.7	77.8
	SS	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel informasi pelaporan keuangan yang menjawab “Netral” 5 orang atau 11.1, yang menjawab “Setuju” 30 orang atau 66.7% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 10 orang atau 22.2%.

Tabel 4.18 Uji Statistik Deskriptif Informasi Pelaporan Keuangan

Y. ⁴					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	4.4	4.4	4.4
	S	31	68.9	68.9	73.3
	SS	12	26.7	26.7	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel informasi pelaporan keuangan yang menjawab “Netral” 2 orang atau 4.4, yang menjawab “Setuju” 31 orang atau 68.9% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 12 orang atau 26.7%

Tabel 4.19 Uji Statistik Deskriptif Informasi Pelaporan Keuangan

Y. ⁵					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	13.3	13.3	13.3
	S	23	51.1	51.1	64.4
	SS	16	35.6	35.6	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel informasi pelaporan keuangan yang “Netral” 6 orang atau 13.3, yang menjawab “Setuju” 23 orang atau 51.1% dan yang menjawab "Sangat Setuju" 16 orang atau 35.6%

4.6 Uji Validitas dan Reabilitas

4.6.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor

total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi	X _{1.1}	0,574	0,294	Valid
	X _{1.2}	0,564	0,294	Valid
	X _{1.3}	0,670	0,294	Valid
	X _{1.4}	0,733	0,294	Valid
	X _{1.5}	0,714	0,294	Valid
Pengawasan Keuangan	X _{2.1}	0,616	0,294	Valid
	X _{2.2}	0,745	0,294	Valid
	X _{2.3}	0,694	0,294	Valid
	X _{2.4}	0,609	0,294	Valid
	X _{2.5}	0,553	0,294	Valid
Informasi Pelaporan Keuangan	Y.1	0,453	0,294	Valid
	Y.2	0,641	0,294	Valid
	Y.3	0,687	0,294	Valid
	Y.4	0,536	0,294	Valid
	Y.5	0,667	0,294	Valid

Sumber : Data diolah diSPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat diketahui variabel independen dan dependen beserta item-item pernyataan yang diuji berdasarkan aplikasi SPSS versi.26 valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

4.6.2 Uji Reliabilitas Data

Pengujian Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk

mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.21 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_1)	0,656	0,60	Reliabel
Pengawasan Keuangan (X_2)	0,642	0,60	Reliabel
Informasi Pelaporan Keuangan(Y)	0,554	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.6.3 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji persial (uji T) dan uji simultan (uji F). Pengujian ini dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian, mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan mengetahui apakah seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

4.6.3.1 Uji Statistik t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Hasil pengujian statistik t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22 Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,254	3,592		2,577	,014
	Sistem Informasi Akuntansi	,282	,113	,343	2,496	,017
	Pengawasan Keuangan	,258	,121	,293	2,129	,039

a. Dependent Variable: Pelaporan Keuangan

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) $t_{hitung} = 2,496 > t_{tabel} = 1,679$ dengan signifikansi $0,017 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam Informasi Pelaporan Keuangan.
- Hipotesis yang kedua diketahui untuk Pengawasan Keuangan (X_2) $t_{hitung} = 2,129 > t_{tabel} = 1,679$ dengan signifikansi $0,039 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam Informasi Pelaporan Keuangan.

4.6.3.2 Uji Statistitik F (Simultan)

Uji F adalah uji bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05. Uji Statistitik F (Simultan) dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.23 Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,234	2	13,617	5,408	,008 ^b
	Residual	105,744	42	2,518		
	Total	132,978	44			
a. Dependent Variable: Pelaporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi						

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F Hitung sebesar 5,408 dan F Tabel pada tingkat signifikan 5% sebesar 5,408 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,008, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F Hitung sebesar $5,408 < F$ Tabel sebesar 3,20 dan nilai sig $0,008 > 0,05$ sehingga variabel sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan secara bersama- sama berpengaruh terhadap pelaporan keuangan.

4.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,453 ^a	,205	,167	1,58673
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi				

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Hasil uji *Adjusted R²* menunjukkan nilai koefisien determinasi *R square* sebesar 0,205 atau 20,5%. Hal ini mengidentifikasi bahwa Informasi Pelaporan Keuangan (Y) dipengaruhi sebesar 20,5% oleh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_1) dan Pengawasan Keuangan (X_2). Adapun sisanya sebesar 79,5% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

4.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat.

Tabel 4.25 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,254	3,592		2,577	,014
	Sistem Informasi Akuntansi	,282	,113	,343	2,496	,017
	Pengawasan Keuangan	,258	,121	,293	2,129	,039

a. Dependent Variable: Pelaporan Keuangan

Sumber: Data diolah tahun 2022

Hasil analisis regresi linier berganda yang tampak pada tabel 4.24, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ maka menghasilkan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Informasi Pelaporan Keuangan. Nilai konstanta untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebesar 0,282

Pengawasan Keuangan dengan nilai sebesar 0,258. Atas dasar hasil analisis regresi tersebut, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 9,254 + 0,282 X_1 + 0,258 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 9,254 bernilai positif yang artinya sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan bernilai 0 maka variabel pelaporan keuangan mengalami kenaikan sebesar 9,254.
- b. Koefisien $b_1 = 0,282$ yang artinya apabila variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi naik satu satuan, maka variabel Informasi Pelaporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,282 artinya Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh dalam Informasi Pelaporan Keuangan, dimana semakin tinggi nilai Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan maka semakin meningkat pula Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dapat terjadi.
- c. Koefisien $b_2 = 0,258$ yang artinya setiap ada kenaikan variabel Pengawasan Keuangan satu satuan. Maka akan menghasilkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan sebesar 0,258

4.7 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo.

Dalam hasil penelitian ini, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi menunjukkan terdapat pengaruh dan signifikan terhadap Informasi Pelaporan

Keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, maka semakin meningkat pula Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dapat terjadi. Dimana Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu bentuk penggunaan individu terhadap nilai dan informasi. Maka secara umum, makna dari penerapan nilai-nilai pengetahuan dalam tiap keyakinan menjadikan individu sebagai bentuk perwujudan dalam bertingkah laku dilingkungannya. artinya jika sistem informasi akuntansi semakin besar dan berarah positif maka informasi pelaporan keuangan akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika sistem informasi keuangan semakin rendah maka akan mengakibatkan informasi pelaporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo juga akan semakin menurun dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap informasi pelaporan keuangan” diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Dari laporan keuangan dapat dilihat performa suatu perusahaan pada kondisi keuangannya dari hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu.

Kinerja suatu perusahaan tergambar dalam laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasisca (2016) dan Fitri Sukmawati dan Rangga (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan. Hal itu karena dengan sistem informasi akuntansi dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar, dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi keuangan salah satunya adalah kualitas kinerja keuangan. Namun penelitian Yafika Mutiara (2019), menunjukkan temuan yang berbeda dimana hasil penelitiannya tentang pengaruh efektivitas sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. (Persero) Tbk. Proyek Pelabuhan Sibolga menunjukkan dalam variabel efektivitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap Informasi Pelaporan Keuangan.

4.7.2 Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo.

Dalam hasil penelitian ini, Pengawasan Keuangan menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Informasi Pelaporan Keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi Pengawasan Keuangan, maka semakin meningkat pula Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dapat terjadi. Dimana Pengawasan Keuangan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam rangka menganalisis lebih lanjut akan tugas dan tanggung jawab yang di laksanakan.

Maka secara umum, makna dari penerapan nilai-nilai pengawasan yang dilakukan dalam bertingkah laku dilingkungannya akan sejalan dengan informasi yang di berikan. artinya jika pengawasan keuangan semakin besar dan berarah positif maka informasi pelaporan keuangan akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika pengawasan keuangan semakin rendah maka akan mengakibatkan informasi pelaporan keuangan pada kantor BPKAD kota palopo juga akan semakin menurun Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Informasi Pelaporan Keuangan” diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dengan penelitian ini Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen. Dimana untuk memperoleh laporan keuangan yang memiliki nilai informasi terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Husna (2019) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal tersebut mengungkapkan bahwa dengan pengawasan dapat membantu dalam mencapai suatu tujuan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga pengawasan dapat menentukan nilai informasinya. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Pratiwi, dkk (2015), dan Armando (2016) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji t Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima.
- b. Berdasarkan hasil uji t Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka saran diajukan penulis yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan beberapa hal yakni memperluas obyek penelitian, dan menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi informasi pelaporan keuangan seperti pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, pencatatan laporan keuangan dan pelaporan pengelolaan keuangan.
2. Pihak BPKAD Kota Palopo diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem informasi akuntansi dan pengawasan keuangan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Islamiyah Nur (2017) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa *Skripsi*. Universitas Muhammdiyah Makassar.
- Ariefsetya Darmawan (2018). Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. *Jornal Universitas Negeri Padang*, Hal.27.
- Agusta, A. (2016). Analisis Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan, Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Dwi Anita Indrawati (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang) Vol.9 Nomor 1, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Fani ikramullah lubis (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Halim, Abdul 2004 Manajemen keuangan daerah. YKPN yogyakarta.
- Husna, M. (2019) Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan di Kota Denpasar. *Warmadewa Management And Business Journal (Wmbj)*, 2(1), 1-9.
- Jezhica S.M. Lengkey(2019). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Manado) Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3588 – 3597. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Mahayuni, N. P. S., Yuniarta, G. A., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *Akuntansi*, 8(2), 4.

- Mardiasmo, 2002 Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Meta Dewi Rianisanti, "Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Sukarta, 2017) H. 40.
- Mila Aguspita (2019). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Modul SIA ; Dunia Akuntansi dan Manajemen, 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2012 Salemba Empat, Jakarta.
- Pramudiarta, R., & Juliarto, A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–14. www.bpk.go.id
- Prasica, T, & Fitri, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. *Jurnal Ilmiah Kesatuan*, 14(1), 71-80
- Pratiwi, D., & Sugiarto, S. (2015). Analisis Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Keuangan di Semarang (*Doctoral Dissertation*, Universitas Diponegoro).
- Pujiswara, I. B., Herawati, N. T., & Kadek, N. Ss. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 2(1).
- Ria Herlina, Taufeni Taufik, A. N. (2021). Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4, 419–433.

- Rizal pramudiarta (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)., Halaman 1-14. *Jurnal Akuntansi Ekonomik dan Bisnis*.
- Rosalin, F. 2011. "faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum pada BLU di Kota Semarang" *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Siska yulia defitri (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefita 3(1) Februari 2018 (64-75)*.
- Sukmawati, S. & Rangga, E. (2018). Sistem Informasi Keuangan Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Bisnis (Business Sustainability) Pada UMKM Rotan Desa Trangsan, Jawa Tengah. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen), 5(2), 124-135*.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- sugiyono(2015) *Metode Penelitian Manajemen*.Bandung:Alfabeta.
- Tuasikal, Askam. 2007 Pengaruh Pengawasan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja perangkat daerah Pada kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. *jurnal keuangan dan perbankan*. Vol.10 No.1 hal. 66-82.
- Tri Listiani (2018). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi ,sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman Empiris Pada Organisasi Perangkat akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Daerah Di Kota Magelang) *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- T.H Handoko “manajemen edisi 2” (Yokyakarta:BPFE, 2015), h. 371-372
- Venny Eka Saputri (2018). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) *Skripsi*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Yafika Mutiara, R. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. (Persero) Tbk. Proyek Pelabuhan Sibolga, 9(8), 3214.

Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.